

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 30 Januari 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 19)	Kamis, 30 Januari 2020	Sejumlah BUJT Akan diterapkan Tarif Baru	Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, penantian sejumlah badan usaha jalan tol untuk memberlakukan tarif baru terhadap ruas tol yang dikelolanya terbayar sudah. Ada sejumlah pengelola yang memperoleh penyesuaian tarif kendati sebelumnya 10 ruas tol disebut-sebut mendapat penyesuaian tarif dua tahunan.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 19)	Kamis, 30 Januari 2020	Prioritas Penyelamatan Kerbau Moa	Kematian ribuan kerbau moa tiap tahun di Pulau Moa, kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, segera dicarikan solusinya. Hal ini untuk menyelamatkan mamalia endemik Pulau Moa itu. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Air Tanah dan Air Baku bws Maluku John Haurissa mengatakan, selaku perwakilan pemerintah pusat di bawah Kementerian PUPR, pihaknya berencana membangun jaringan pengairan ke kubangan kerbau.
3	Kompas (Halaman, 15)	Kamis, 30 Januari 2020	Sistem Pengendalian Banjir Ditargetkan Rampung 2020	Upaya untuk mengatasi banjir tahunan di Kabupaten Bandung, JAWA Barat, terus dilakukan secara bertahap. Penanganan di bagian hulu sungai citarum bakal berlanjut ke bagian hilir.
4	Kompas (Halaman, 18)	Kamis, 30 Januari 2020	Info Grafis	Bencana Ekologi di DAS Cidurian
5	Kompas (Halaman, 13)	Kamis, 30 Januari 2020	Berita Foto	Perumahan di Pinggir Cisdane

Judul	Sejumlah BUJT Akan terapkan Tarif Baru	Tanggal	Kamis, 30 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 19)		
Resume	Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, penantian sejumlah badan usaha jalan tol untuk memberlakukan tarif baru terhadap ruas tol yang dikelolanya terbayar sudah. Ada sejumlah pengelola yang memperoleh penyesuaian tarif kendati sebelumnya 10 ruas tol disebut-sebut mendapat penyesuaian tarif dua tahunan.		

► JALAN TOL

Sejumlah BUJT Akan Terapkan Tarif Baru

Setelah menunggu beberapa waktu lamanya, penantian sejumlah badan usaha jalan tol untuk memberlakukan tarif baru terhadap ruas tol yang dikelolanya terbayar sudah. Ada sejumlah pengelola yang memperoleh penyesuaian tarif kendati sebelumnya 10 ruas tol disebut-sebut mendapat penyesuaian tarif dua tahunan.

Aprianus D. Tolok dan Agne Yasa
redaksi@bisnis.com

Pada awal bulan ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memerinci 10 ruas jalan tol yang akan memperoleh penyesuaian tarif dengan lima ruas di antaranya sudah mencapai proses akhir.

Kelima ruas tol tersebut adalah Cawang—Tomang—Pluit, Ujung Pandang Seksi 1 dan 2, Bali Mandara, Pondok Aren—Serpong, dan Gempol—Pandaan Seksi 1.

Kemudian, sebanyak dua ruas tol yakni Tangerang—Merak dan Pasirkoja—Soreang dalam proses permintaan persetujuan unit kerja eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun, tiga ruas tol lainnya yakni tol Palimanan—Kanci (Palikanci), Belawan—Medan—

pemerintah dan investor.

Kemarin, Rabu (29/1), manajemen PT Bintaro Serpong Damai selaku anak usaha dari PT Margautama Nusantara mengumumkan penyesuaian tarif baru jalan tol Pondok Aren—Serpong. Tarif baru akan mulai diberlakukan pada 31 Januari 2020, pukul 00.00 WIB.

Dalam konferensi pers, Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai Purwoto mengatakan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR No. 1233/KPTS/M/2019 tentang Penyesuaian Tarif pada Ruas Jalan Tol Pondok Aren—Serpong.

“Penyesuaian tarif ini diterapkan setelah adanya penilaian dan evaluasi atas pemenuhan seluruh standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol,” ujar Purwoto.



Sebanyak 10 Ruas Tol yang Dikelola Badan Usaha Jalan Tol yang Telah dan Akan Mendapatkan Penyesuaian Tarif

Tanjung Morawa (Belmera), dan Surabaya—Gempol telah sampai pada proses penyusunan berita acara penyesuaian tarif.

Sebenarnya, penyesuaian tarif tol bukan barang baru. Hal itu diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir perubahan diatur melalui PP Nomor 30/2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15/2005 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Dan, hal terpenting adalah badan usaha jalan tol (BUJT) harus memenuhi standar pelayanan minimal yang menjadi tolok ukur apakah ruas tol yang sudah memasuki masa untuk dilakukan penyesuaian tarif sudah memenuhi semua standar pelayanan minimal (SPM).

Keputusan penyesuaian tarif tol sesungguhnya bertujuan untuk mengembalikan investasi dan biaya operasional atau pemeliharaan jalan tol dan untuk mempertahankan SPM terhadap semua ruas jalan tol.

Keputusan tersebut juga sudah diatur dalam perjanjian perusahaan jalan tol antara

► **Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.**

► **Penyederhanaan skema tarif di sejumlah ruas tol diyakini berdampak positif bagi para pelaku bisnis logistik.**

Beberapa hari sebelumnya, BUJT lain, yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. menyatakan bahwa mereka akan melakukan penyesuaian tarif tol dalam Kota Jakarta atau Jakarta Intra Urban Toll Road dalam waktu dekat. Tarif tol dalam kota terakhir kali disesuaikan pada Desember 2017.

Berdasarkan informasi dari akun media sosial Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar (@jsmr_jabodetabekjabar) dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (@senkom_cmp), penyesuaian tarif didasarkan pada Keputusan Menteri PUPR No. 1231/KPTS/M/2019.

Kendati demikian, belum dipastikan kapan penyesuaian tarif tol dalam kota resmi diberlakukan.

Terkait dengan tanggal penyesuaian, Ira Susiyanti, Marketing & Communication Department Head Jasa Marga Regional Jabodetabek Jabar kepada *Bisnis*, Jumat (24/1), mengatakan, "Mohon ditunggu saja."

Jalan tol dalam kota mencakup ruas Cawang—Tomang—Pluit dan Cawang—Tanjung Priok—Ancol Timur—Jembatan Tiga/Pluit. Jalan tol dalam kota dioperasikan bersama oleh Jasa Marga dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. sejak 1994.

Selain itu, PT Bosowa Marga Nusantara juga memperoleh penyesuaian tarif ruas tol Ujung Pandang Seksi 1 dan 2 yang akan dilaksanakan pada 31 Januari 2020. Penyesuaian tarif ini akan diterapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PUPR Rakyat Nomor 1232/KPTS/M/2019 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 1 dan 2.

Direktur Utama PT Bosowa Marga Nusantara Anwar Toha mengatakan bahwa perusahaan telah memenuhi SPM sebagai



Ruas	Panjang (km)	BUJT	Beroperasi	Konsesi (tahun)
Cawang—Tomang—Pluit	23,55	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1997	40
Ujung Pandang Seksi 1 dan 2	6,05	PT Bosowa Marga Nusantara	1998	49
Nusa Dua—Ngurah Rai—Benoa (Bali Mandara)	10	PT Jasamarga Bali Tol	2013	45
Pondok Aren—Serpong	7,25	PT Bintaro Serpong Damai	1999	31
Gempol—Pandaan	12,05	PT Jasamarga Pandaan Tol	2015	37
Tangerang—Merak	72,29	PT Marga Mandala Sakti	1992	50
Soreang—Pasir Koja	8,15	PT Citra Marga Lintas Jabar	2017	40
Pallimanan—Kanci	26,30	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1998	40
Belawan—Medan—Tanjung Morawa	33,70	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1989	40
Surabaya—Gempol	46,55 6	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1986/2015/2018	40

Sumber: BUJT, Januari 2020

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

salah satu syarat untuk melakukan penyesuaian tarif.

"Selain itu, penyesuaian tarif untuk ruas jalan tol Ujung Pandang Seksi 1 dan 2 diberlakukan berdasarkan angka inflasi di Kota Makassar selama 2 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yaitu sebesar 7,42%," ujarnya melalui siaran pers, Senin (27/1).

PENGUSAHA TRUK

Lantas, bagaimana konsumen, khususnya pengusaha truk, memandang keputusan pemerintah menyesuaikan tarif pada sejumlah ruas tol tersebut?

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Kyatmadja Lookman meyakini penyederhanaan skema tarif di sejumlah ruas tol yakni golongan II dan III menjadi satu

tarif, pun golongan IV dan V, berdampak positif bagi para pelaku bisnis logistik.

"Justru saya lihatnya *kok*, positif ya. Yang naik [tarif] hanya golongan I. Sementara itu, kendaraan roda empat dan lebih relatif tidak berubah," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (29/1).

Di balik penyesuaian tarif yang lebih menguntungkan bagi pengusaha logistik, Kyat tetap berharap agar pemenuhan SPM oleh pengelola harus tetap dijaga sepanjang waktu atau tidak hanya dilakukan ketika jadwal penyesuaian tarif sudah dekat.

"Pemenuhan SPM harus dijaga sepanjang waktu. Misalnya, jalan tol itu *enggak* boleh berlubang, kalau berlubang harus segera diperbaiki secepatnya!" katanya. Penyesuaian tarif memang sudah

diatur dalam undang-undang dan aturan turunannya. Adanya penyesuaian tarif diharapkan dapat memberi kepastian dalam investasi di sektor ini sehingga tetap menarik bagi pemodal dalam negeri, baik swasta maupun badan usaha milik negara, serta investor asing.

Apalagi, penyesuaian tarif dilaksanakan dengan menaikkan tarif kendaraan kecil yang volume lalu lintas harian rata-ratanya sangat tinggi.

Sementara itu, di sisi lain, tarif golongan kendaraan berat yang jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kendaraan kecil diturunkan. Hal ini tentunya dapat merangsang minat pengusaha logistik dan bus untuk menggunakan jalan tol sehingga distribusi dan waktu tempuh menjadi lebih cepat. □

Judul	Prioritas Penyelamatan Kerbau Moa	Tanggal	Kamis, 30 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 19)		
Resume	Kematian ribuan kerbau moa tiap tahun di Pulau Moa, kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, segera dicarikan solusinya. Hal ini untuk menyelamatkan mamalia endemik Pulau Moa itu. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Air Tanah dan Air Baku bws Maluku John Haurissa mengatakan, selaku perwakilan pemerintah pusat di bawah Kementerian PUPR, pihaknya berencana membangun jaringan pengairan ke kubangan kerbau.		

SATWA ENDEMIK MALUKU

Prioritas Penyelamatan Kerbau Moa

AMBON, KOMPAS — Kematian ribuan kerbau moa tiap tahun di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, segera dicarikan solusinya. Hal ini untuk menyelamatkan mamalia endemik Pulau Moa itu.

Upaya penyelamatan di antaranya dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. LPPM Universitas Pattimura akan mengkaji ancaman kepunahan kerbau moa. Sementara BWS Maluku berjanji membangun jaringan pengairan ke kubangan kerbau.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 1.500 ekor kerbau moa mati setiap tahun akibat kekurangan air saat kemarau. Kerugian akibat kematian 1.500 kerbau itu mencapai Rp 15 mi-

liar (*Kompas*, 29/1/2020).

Abraham Mariwy, peneliti LPPM Universitas Pattimura, mengatakan, masalah kematian kerbau moa menjadi program prioritas yang akan digarap tahun ini. Mamalia khas Maluku tersebut harus dilestarikan agar tidak punah seperti hewan endemik lain yang kini kritis.

"Kami segera bentuk tim untuk masalah kerbau moa. Banyak orang di Maluku tidak tahu akan kondisi ini. Ini bisa menjadi peringatan akan kepunahan," ujar Abraham, Rabu (29/1), di Ambon.

Data Badan Pusat Statistik Maluku menunjukkan populasi kerbau moa terus berkurang. Tahun 2014, jumlah kerbau moa yang terdata 14.353 ekor. Namun, pada 2018, populasinya menyusut menjadi 11.323 ekor. Artinya, dalam empat tahun,

populasinya berkurang seperlima.

Abraham, yang juga tokoh pemuda Maluku Barat Daya, kecewa dengan lambatnya penanganan oleh pemerintah daerah terkait masalah tahunan itu. Pada Selasa (28/1), Wakil Gubernur Maluku Barnabas N Orno mengakui, tahu persis masalah itu lantaran pernah menjadi Bupati Maluku Barat Daya selama dua periode. Namun, daerah tak punya anggaran untuk mengatasi kematian ribuan kerbau moa.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Air Tanah dan Air Baku BWS Maluku John Haurissa mengatakan, selaku perwakilan pemerintah pusat di bawah Kementerian PUPR, pihaknya berencana membangun jaringan pengairan ke kubangan kerbau. (FRN)

Judul	Sistem Pengendalian Banjir Ditargetkan Rampung 2020	Tanggal	Kamis, 30 Januari 2020
Media	Kompas (Halaman, 15)		
Resume	Upaya untuk mengatasi banjir tahunan di Kabupaten Bandung, JAWA Barat, terus dilakukan secara bertahap. Penanganan di bagian hulu sungai citarum bakal berlanjut ke bagian hilir.		

Sistem Pengendalian Banjir Ditargetkan Rampung 2020

Upaya untuk mengatasi banjir tahunan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terus dilakukan secara bertahap. Penanganan di bagian hulu Sungai Citarum bakal berlanjut ke bagian hilir.

BANDUNG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meresmikan Terowongan Nanjung di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Infrastruktur rak-sasa ini bakal melengkapi sistem pengendalian banjir Citarum hulu yang ditargetkan pemerintah rampung tahun ini.

Terowongan Nanjung terdiri dari dua terowongan air, masing-masing sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter. Terowongan ini diklaim mampu meningkatkan kapasitas debit Citarum dari 570 meter kubik per detik menjadi 700 meter kubik per detik. Letaknya di sekitar kawasan Curug Jompong. Kawasan di aliran Sungai Citarum lama itu terbentuk dari sisa lava gunung api purba sekitar 4 juta tahun lalu.

Akan tetapi, terowongan yang berfungsi melancarkan aliran Sungai Citarum itu belum cukup efektif mengatasi banjir di kawasan Bandung selatan. Alasannya, banjir masih melanda tiga kecamatan di Bandung selatan, yaitu Baleendah,



KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Bupati Bandung Dadang M Naser (dari kanan ke kiri) berbincang di depan Terowongan Nanjung, Margaasih, Kabupaten Bandung, Jabar, Rabu (29/1/2020). Presiden meresmikan dua terowongan air yang berfungsi untuk mengurangi banjir di kawasan Bandung selatan.

Dayeuhkolot, dan Bojongsoang, dalam sepekan terakhir. Banjir merendam ribuan rumah dan sejumlah ruas jalan utama.

"Memang masih ada kawasan yang kebanjiran. Saat ini, masih ada beberapa proyek (pengendalian banjir) yang masih proses (dikerjakan). Namun, kita sudah berada di jalur yang betul. Semuanya dikerjakan dari hulu ke hilir, baik infrastruktur fisik maupun rehabilitasi lahan," ujar Presiden Jokowi.

Sejauh ini, sejumlah proyek infrastruktur dibangun di hulu Citarum. Pada tahun 2018, pemerintah menyelesaikan pembangunan kolam retensi Cieunteung (Kabupaten Bandung)

dan embung Gedebage (Kota Bandung). Selain itu, normalisasi Sungai Cibeureum dan Sungai Cilembar juga dilakukan untuk memaksimalkan fungsinya mengalirkan air.

Infrastruktur untuk mengatasi banjir luapan Citarum yang masih dibangun antara lain sodetan Cisangkuy, kolam retensi Andir, serta sejumlah polder di sekitar Citarum. Saat semuanya tuntas tahun ini, pemerintah bakal melanjutkan pembangunan infrastruktur ke kawasan hilir Citarum, seperti Karawang dan Bekasi.

"Kita baru mengerjakan di

hulu, itu pun belum selesai. Jika semuanya sudah 100 persen, baru kita bicara banjir banyak berkurang," ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sebelum Terowongan Nanjung dioperasikan, aliran Citarum terhambat di Curug Jompong karena bentuk sungainya melengkung. Dengan adanya terowongan, sebagian besar debit Citarum dapat mengalir tanpa melalui Curug Jompong.

Hasil dari pembangunan Terowongan Nanjung mulai terlihat dari berkurangnya luasan banjir. Luasan banjir pada 2016

mencapai 490 hektar. Namun, pada Januari 2020 berkurang menjadi 80 hektar.

Lama genangan juga berkurang. Sebelum ada terowongan, hujan empat hari dengan curah hujan 35 milimeter-67 milimeter membuat Dayeuhkolot terendam selama 40 jam, April 2019. Setelah dibangun terowongan, hujan selama lima hari dengan intensitas 60 mm-72 mm menggenangi kawasan yang sama selama 11 jam.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap, infrastruktur yang sedang dikerjakan dan direncanakan segera rampung

agar penanganan banjir di Bandung berjalan optimal.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Bob Arthur Lombogia mengatakan, penyelesaian pembangunan kolam retensi Andir, polder Bojongsoang, dan sodetan Cisangkuy membutuhkan dukungan masyarakat, salah satunya terkait penyediaan lahan.

Sementara itu, Asep Solihin (35), warga Dayeuhkolot, menilai, sistem pengendali banjir belum memberi hasil ideal. Meski demikian, banjir lebih cepat surut dibandingkan tahun sebelumnya. (TAM/CHE/LAS)

Judul	Info Grafis	Tanggal	Kamis, 30 Januari 2020
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Bencana Ekologi di DAS Cidurian		

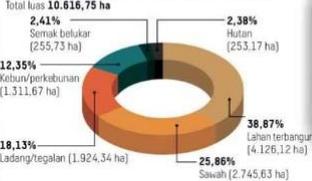
Batas Daerah Aliran Sungai Cidurian dan Kecamatan Terdampak Banjir 1-4 Januari 2020



Bencana Ekologi di DAS Cidurian

Alih fungsi lahan kawasan konservasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di kawasan hulu dan tengah DAS. Kecamatan Nanggung, Sukaraja, Ciguged, dan Jasinga sesuai RTRW Kabupaten Bogor (2016-2036) ditetapkan menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kemudian Kecamatan Maja dan Sajira di Kabupaten Lebak direncanakan menjadi kawasan resapan air. Namun, sebagian lahan di kecamatan tersebut telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, tambang, dan perumahan. Akibatnya di awal tahun ini terjadi bencana banjir dan tanah longsor di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor dan Lebak yang masuk dalam area DAS Cidurian. (M. Puteri Rosalina/Litbang Kompas)

Penggunaan lahan DAS Cidurian (2014)



- **Perkebunan sawit:** Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Ciguged, Kabupaten Bogor, serta Kecamatan Maja dan Curugbitung, Kabupaten Lebak.
- **Kompleks Perumahan (Citra Maja Raya):** Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.



Penambangan Emas Ilegal di Gunung Halimun

- Lokasi penambangan di DAS Cidurian: Kecamatan Ciguged, Kabupaten Bogor; Kecamatan Curugbitung dan Sajira, Kabupaten Lebak.
- Ada 10 blok penambangan emas tanpa izin tersebar di Kabupaten Lebak, Bogor dan Sukabumi (TNHHS, 2019).
- Aktivitas penambangan yang melubangi tanah tanpa menimbunnya kembali mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang.

Wilayah Terdampak Banjir dan Longsor

Kabupaten Bogor	Kabupaten Lebak
<ul style="list-style-type: none"> Babakan Madang Bojonggede Gunung Putri Cisarua Sukaraja Comas Megamendung Luwilang Rumpin Ciawi Nanggung 	<ul style="list-style-type: none"> Sajira Cipanas Lebakgedong Maja Cimarga Curugbitung

DAS Cidurian
DAS Cidurian melintasi wilayah administrasi Kabupaten Bogor, Lebak, Tangerang, dan Serang

DAS Cidurian terdiri dari sub-DAS Cibereum, Cipangaur, Gilay, Cidurian Hulu, Cikande, Cidurian

Sumber: BPRD Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, laman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, SIPPL, laman Kompas.com, serta RRI BIG, dan integrasi citra Google Earth, periklanan 31 Juli 2019. Ditulis Litbang Kompas/TINA/PUTI/APPY/DTN

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 30 Januari 2020
Media	Kompas (Halaman, 13)		
Resume	Perumahan di Pinggir Cisadane		

Perumahan di Pinggir Cisadane



KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pembangunan kompleks perumahan di pinggir Sungai Cisadane di Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (29/1/2020). Kebutuhan rumah yang terus meningkat serta semakin mahalnya harga tanah di perkotaan membuat pembangunan rumah terus berkembang ke daerah pinggiran atau penyangga kota. Daerah-daerah yang rawan banjir, seperti pinggir sungai, pun marak dijadikan lokasi pembangunan rumah.